

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunur N., Mulyani, S., & Alfian, A., (2020). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Entitas Akuntansi. Jakarta: Kencana.
- Akbar, Aidil F., & Huda, N. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Economic Development*.
- Aliu, Siskawati D., Makur, Dharmawaty S., & Yusuf, Fitria Melynsyah. (2021). Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*.
- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating di Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2018.
- Ariyanti, D., Masnila, N., & Choiruddin. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera. *CAKRAWALA – Repositori IMWI*.
- Ariwibowo, T. (2015). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*.
- Asnah., Febrianti, E., Sabri., & Nasfi. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2006-2020. *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*.
- Beritasatu.com. (2023, Oktober 4). Kemenkeu: APBD Jangan Hanya untuk Belanja Pegawai. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1070109/kemenkeu-apbd-jangan-hanya-untuk-belanja-pegawai>
- CNNIndonesia. (2025, Februari 03). Pembangunan Masjid Al-Jabbar Gunakan Dana Utang PEN Rp207 Miliar. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250203131056-20-1193978/pembangunan-masjid-al-jabbar-gunakan-dana-utang-pen-rp207-miliar>
- Dahliah. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*.
- Detikfinance. (2021, Desember 07). Sri Mulyani Pangkas Belanja Pegawai Pemda, Maksimal Cuma 30%. Diakses dari <https://shorturl.at/II615>
- DetikJabar. (2022, Oktober 04). Miliaran Rupiah di Teras Cihampelas Bandung yang Kini Mati Suri. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d->

6326897/miliaran-rupiah-di-teras-cihampelas-bandung-yang-kini-mati-suri?page=1

- DetikJabar. (2025, Februari 06). 7 Hal Tentang Utang di Balik Megahnya Masjid Al Jabbar. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7765016/7-hal-tentang-utang-di-balik-megahnya-masjid-al-jabbar>
- Eksandy, A., Hakim. Mohamad Zulman., Ekawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Ependi, E., Ningsih, P. T. S., Gusvarizon, M., & Mahendrawati, C. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 29–43. <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i2.1869>
- Fitriani, Y., & Budi Hendaris, R. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020). *Akuntansi* 45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.890>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi ke 4). Semarang: UNDIP
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah* (edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 5.
- Indriastuti, L., & Satriawan, B. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Pemoderasi. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 13(2).
- Kharisma, B. (2014). Good Governance sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 1.
- Lubis, Salsa Okdania., & Nasution, Dito Aditia D. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terbaru 2018). Yogyakarta: ANDI.

- Maryati, S., & Muttaqin, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020. JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer.
- Mbuinga, F., Karundeng, Deby R., & Suyanto, Mohamad A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. Jurnal Pendidikan Tambusai
- Meiriana, Anindya Z., Kusumaningtyas, Sahastian A., & Pengestuti, Annisa L. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur 2016-2022. Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan (KEAT).
- Muhammad, F. (2024). Teori Governance. Malang: Selaras Media Kreasindo
- Mulya Firdaus, C. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mutmaina, Yowana Rachma. (2017). Determinasi Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Purba, E., Damanik, D., Damanik, P., Ekonomi, F., Simalungun, U., & Siantar, P. (2023). Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Pematang Siantar. Jurnal KAFEBIS-Jurnal Kajian Fenomena Ekonomi & Bisnis, 01(01). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51622/kafebis.v1i1.1973>
- Rahmanda Putri, C., & Hamdani Putra, G. (2024). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS).
- Ramadhani, D., Indrawan, I Gede A., & Juitania. (2023). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Banten Periode 2012-2021). BUDGETING : Journal of Business, Management, and Accounting.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah.
- Portal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses dari <https://www.jabarprov.go.id/>
- Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Ritonga, Fitri Dewi S., & Sari Dewi, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kab/Kota Sumatera Utara (2018-2019). *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*.
- Rohana, S., & Asoka, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *SURPLUS: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*.
- Safa'ah, L. N., Rahmawati, E., Novem, A. A., Azizah, F. K., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*, Volume 1, No. 4
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIN YKPN.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIN YKPN.

- Sudaryono. (2023). Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyanta. (2016). “Analisis Belanja Modal dan faktor-faktor yang Mempengaruhi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Jurnal Akuntansi Universitas Jember
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tiara, E., & Sari, I. (n.d.). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Usman, B., & Nurazi, R., (2021). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Bandung: Mandar Maju
- Usman, S., Mawardi, M. S., Poesoro, A., Suryahadi, A., & Sampford, C. (2008). The Specific Allocation Fund (DAK): Mechanisms and Uses.
- Uyanto, Stanislaus. S. (2006). Pedoman Analisis Data dengan SPSS (Edisi Kedua). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahab, La Ode A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura.
- Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset Dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Economic Growth sebagai Variabel Moderating Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016. Journal of Islamic Finance and Accounting.
- Yudiatmaja, F. (2013). Analisis Regresi dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.